KANTOR WILAYAH
DITJEN PEMASYARAKATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN MINGGUAN

5 SEPTEMBER-11 SEPTEMBER 2026



085 - 169 - 767 - 212
@pemasyarakatanjogja

SAMBUTAN KAKANWIL



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) dapat menyusun laporan kegiatan ini. Publikasi ini merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan dokumentasi pelaksanaan tugas serta fungsi pemasyarakatan, sekaligus menjadi sarana informasi mengenai berbagai program, kegiatan, dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

Seluruh kegiatan yang tersaji dalam laporan ini dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Asta Cita Presiden Republik Indonesia, 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta 21 Arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pedoman tersebut menjadi landasan dalam memperkuat pembinaan warga binaan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.



Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran kinerja Kanwil Ditjenpas DIY secara menyeluruh, menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat, serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan yang semakin maju, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

M. ALI SYEH BANNA

KAKANWIL DITJENPAS DIY APRESIASI BUDIDAYA AYAM PETELUR RUTAN JOGJA, BEKALI WBP KETERAMPILAN DAN PENGHASILAN



YOGYAKARTA — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kakanwil Ditjenpas DIY) Muhammad Ali Syeh Banna memberikan apresiasi terhadap program pembinaan kemandirian yang dikembangkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Yogyakarta melalui budidaya ayam petelur. Program tersebut dinilai mampu memberikan keterampilan sekaligus manfaat ekonomi nyata bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Apresiasi tersebut disampaikan Kakanwil saat melakukan kunjungan ke Rutan Kelas IIA Yogyakarta bersama Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Karo Ren Keu Kemenimipas), Sabtu (5/9). Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung berbagai program pembinaan kemandirian yang dijalankan oleh WBP, salah satunya budidaya ayam petelur.

Menurut Muhammad Ali Syeh Banna, program tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian aktivitas selama WBP menjalani masa pidana, tetapi juga mempersiapkan mereka agar memiliki keterampilan produktif sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.

“Program seperti ini sangat baik karena WBP tidak hanya diberikan kegiatan, tetapi juga keterampilan yang dapat menjadi bekal ketika mereka selesai menjalani masa pidana. Ini adalah proses pembinaan yang memberikan nilai tambah dan membuka peluang bagi mereka untuk mandiri setelah kembali ke masyarakat,” ujar Ali.

Program budidaya ayam petelur di Rutan Jogja menjadi wujud pembinaan kemandirian yang membekali warga binaan pemasyarakatan (WBP) keterampilan peternakan sekaligus dampak ekonomi langsung melalui penerimaan premi. Penghasilan tersebut bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pribadi WBP maupun disalurkan kepada keluarga.

Menurut Kakanwil Ditjenpas DIY, Ali, program ini perlu terus dikembangkan keberlanjutan dan pemasarannya guna memperkuat jiwa kewirausahaan WBP sebagai bekal setelah bebas, sekaligus mendukung 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memajukan UMKM karya warga binaan.

KARO REN KEU KEMENIMIPAS APRESIASI RUTAN JOGJA LUNCURKAN INOVASI ALAT PENGOLAH SAMPAH





Yogyakarta — Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan apresiasi atas inovasi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Yogyakarta dalam menghadirkan alat pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Peresmian dan Launching Alat Pengelolaan Sampah di Rutan Kelas IIA Yogyakarta, Sabtu (5/9).

Menurut Karo Ren Keu Kemenimipas, kehadiran alat pengelolaan sampah tersebut merupakan bentuk nyata komitmen jajaran pemasyarakatan untuk tidak hanya menjalankan tugas utama penyelenggaraan pemasyarakatan, tetapi juga mengambil bagian dalam menjawab persoalan lingkungan di sekitar.

Ia menilai, inovasi yang dilakukan Rutan Jogja menjadi langkah positif karena pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan, tetapi juga bagaimana sampah dapat dikelola secara efektif dan memberikan manfaat.

“Saya mengapresiasi langkah Rutan Yogyakarta yang telah menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah. Ini menunjukkan bahwa jajaran pemasyarakatan memiliki kepedulian dan komitmen untuk turut mendukung program pemerintah daerah sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Rutan Kelas IIA Yogyakarta terhadap Program Jogja Olah Sampah (JOS) yang dicanangkan Pemerintah Kota Yogyakarta. Melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah, timbulan sampah yang dihasilkan di lingkungan Rutan diharapkan dapat ditekan sekaligus diolah menjadi sesuatu yang memiliki nilai manfaat.

Rutan Kelas IIA Yogyakarta resmi meluncurkan alat pengelolaan sampah guna mendukung Program Jogja Olah Sampah dan memperkuat tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Rangkaian acara yang diisi dengan laporan Kepala Rutan, pemaparan akademisi, serta sambutan pimpinan ini diresmikan oleh Kakanwil Ditjenpas DIY bersama Karo Ren Keu Kemenimipas. Melalui peragaan alat dan peninjauan lokasi, kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi, perawatan sarana, dan konsistensi penggunaan teknologi agar tidak sekadar menjadi seremoni. Karo Ren Keu berharap inovasi Rutan Jogja dapat membangun budaya kerja peduli lingkungan sekaligus menjadi percontohan yang menginspirasi satuan kerja pemasyarakatan lainnya.

KANWIL DITJENPAS DIY IKUTI APEL VIRTUAL DAN PENGUATAN BERSAMA DITJENPAS



YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) mengikuti apel virtual dan penguatan dengan Direktorat Jenderal Permasyarakatan melalui Zoom Meeting, Senin (7/9). Kegiatan tersebut menjadi sarana koordinasi sekaligus penguatan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Permasyarakatan.

Kegiatan diawali dengan penguatan yang disampaikan langsung oleh Drs. Mashudi selaku Direktur Jenderal Permasyarakatan. Dalam arahannya, Mashudi menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama masyarakat, khususnya warga binaan yang terdampak bencana alam. Ia juga mengingatkan jajaran di wilayah lain untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengantisipasi penyebaran penyakit dengan menggunakan masker.

"Kita harus menyikapi kepedulian terhadap sesama masyarakat maupun warga binaan kita yang terkena bencana alam. Daerah lain juga harus mengantisipasi untuk menggunakan masker," ujar Mashudi selaku direktur jenderal pemasyarakatan.

Beliau menekankan pentingnya koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh informasi terkait kondisi dan potensi bencana di masing-masing daerah sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan antisipasi. Selain itu, jajaran Pemasyarakatan diminta memperkuat pemantauan dan pengamanan guna menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk mencegah peredaran narkoba, praktik penipuan, serta berbagai potensi gangguan keamanan. Kondisi warga binaan juga perlu diperhatikan agar suasana di lapas dan rutan tetap kondusif, disertai pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai, termasuk terhadap indikasi pelanggaran seperti judi *online* serta perhatian terhadap kesejahteraan pegawai.

Seluruh jajaran diharapkan menjaga kesehatan, kekompakan, soliditas, dan saling mengingatkan dalam menjalankan tugas. Melalui penguatan tersebut, jajaran Pemasyarakatan diharapkan semakin siap menghadapi berbagai tantangan serta mampu mewujudkan penyelenggaraan Pemasyarakatan yang aman, tertib, dan profesional.



KAKANWIL DITJENPAS DIY TANAMKAN HOKI KEPADA JAJARAN BAPAS WONOSARI



GUNUNGKIDUL – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY), Muhammad Ali Syeh Banna, memberikan penguatan tugas dan fungsi kepada jajaran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari, Senin (7/9). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.

Penguatan diikuti oleh seluruh pegawai Bapas Kelas II Wonosari dan berlangsung dalam suasana dialogis. Ali Syeh menekankan bahwa setiap insan Pemasyarakatan memiliki amanah besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab dan sesuai ketentuan.

Dalam arahannya, Ali Syeh mengajak seluruh jajaran untuk menjalankan tugas dengan sepenuh hati serta menjadikan tanggung jawab sebagai budaya kerja sehari-hari.

“Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawablah terhadap setiap amanah yang diberikan. Integritas dan rasa tanggung jawab adalah kunci untuk menghadirkan pelayanan Pemasyarakatan yang berkualitas,” tegas Ali Syeh.

Ia juga memperkenalkan prinsip HOKI sebagai pedoman dalam membangun karakter pegawai, yakni Harapan untuk menjadi yang terbaik, Optimis, Keyakinan kepada Tuhan, dan Ilmu. Menurutnya, pegawai yang terus belajar dan memiliki keyakinan akan mampu menghadapi tantangan serta memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi.

“Pegang prinsip HOKI: miliki harapan untuk menjadi yang terbaik, tetap optimis, kuatkan keyakinan kepada Tuhan, dan teruslah menuntut ilmu karena orang yang berilmu akan mampu membawa perubahan yang baik,” pesannya.

Melalui kegiatan penguatan ini, Kanwil Ditjenpas DIY menegaskan komitmennya untuk terus membangun sumber daya manusia Pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan adaptif. Diharapkan seluruh jajaran Bapas Kelas II Wonosari semakin solid dalam menjalankan tugas serta menghadirkan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.



SOSIALISASI ANUGERAH PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2026



YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) D.I. Yogyakarta menegaskan komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini dibuktikan melalui keikutsertaan jajaran Kanwil Ditjenpas DIY dalam Sosialisasi Anugerah Pembangunan Budaya Integritas (APBI) dan Evaluasi Pembangunan Budaya Integritas Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (7/9) di Aula Semar Wicaksana tersebut diikuti secara seksama oleh Tim Perencanaan dan Reformasi Birokrasi (RB) Kanwil Ditjenpas DIY.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kristiana Hambawani, melaporkan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan arahan Inspektur Jenderal melalui Surat Nomor INJ-OT.03.02-76 sebagai kelanjutan dari proses Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan pengintegrasian Rencana Aksi Tematik (RAT) RB 2026. Maksud dan tujuan utama dari penyelenggaraan APBI adalah untuk mendorong perbaikan tata kelola di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sekaligus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada unit kerja yang konsisten dan berhasil mempertahankan serta melanjutkan Pembangunan ZI menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal menegaskan bahwa Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi bukanlah sekadar rutinitas atau kontestasi tahunan semata. Lebih dari itu, hal tersebut merupakan kewajiban untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Jajaran di tingkat satuan kerja diminta untuk senantiasa menjaga integritas, mewujudkan zero maladministrasi, mematuhi standar pelayanan publik, menghadirkan inovasi yang berdampak nyata, serta tertib dalam mengelola data dukung administrasi guna menjaga kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi memaparkan mekanisme penilaian APBI 2026 bagi 53 satker usulan berbasis evaluasi ZI (60%) dan RAT RB (40%), yang mencakup LKE, panel TPI, verifikasi lapangan, observasi responden, serta enam fokus perhatian khusus seperti penanganan pengaduan/berita viral dan clearance lembaga eksternal (Ombudsman, KPK, BIN). Berbekal pemahaman ini, Tim Perencanaan dan RB Kanwil Ditjenpas DIY berkomitmen menjadikan Pembangunan ZI sebagai fondasi budaya kerja yang profesional dan berdampak nyata pada pelayanan publik, bukan sekadar pemenuhan administratif.

MANFAATKAN LAHAN KANTOR, BAPAS WONOSARI PANEN PULUHAN KILO SAYUR

WONOSARI – Lahan terbatas di lingkungan perkantoran bukan menjadi penghalang untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut dibuktikan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari melalui pemanfaatan lahan kantor menjadi area produktif yang menghasilkan puluhan kilogram berbagai jenis sayuran.

Bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) Muhammad Ali Syeh Banna, jajaran Bapas Wonosari melaksanakan panen sayuran hasil budidaya di lingkungan kantor, Senin (7/9).

Beragam sayuran berhasil dipanen, di antaranya sawi, pakcoy, terong, serta sejumlah tanaman hortikultura lainnya. Hasil tersebut merupakan buah dari perawatan dan kerja bersama para pegawai Bapas Wonosari dengan melibatkan klien pemasyarakatan dalam proses penanaman hingga pemeliharaan tanaman.



Bapas Wonosari mengoptimalkan lahan tidur kantor untuk program pertanian guna mendukung ketahanan pangan sekaligus membekali klien pemasyarakatan dengan keterampilan bercocok tanam. Hasil panen puluhan kilogram sayuran tersebut dijual murah kepada pegawai dan warga sekitar, serta dibagikan gratis kepada klien yang terlibat.

Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, mengapresiasi inovasi ini sebagai wujud nyata 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain menguatkan fungsi pembinaan, Bapas Wonosari berkomitmen melanjutkan program ini agar pemasyarakatan terus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.



KANWIL DITJENPAS DIY SALURKAN AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK KEKERINGAN DI GUNUNGKIDUL



GUNUNGKIDUL – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY), Muhammad Ali Syeh Banna, terjun langsung bersama jajaran dalam kegiatan bakti sosial penyaluran air bersih di Banjarejo, Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Senin (7/9).

Kegiatan ini merupakan wujud implementasi 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebanyak 20 truk tangki air bersih disalurkan ke 5 padukuhan yang ada di Kalurahan Banjarejo untuk membantu memenuhi kebutuhan air warga di tengah musim kemarau.

Muhammad Ali Syeh Banna menyampaikan bahwa kehadiran jajaran Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas pembinaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kepedulian sosial dan semangat gotong royong jajaran Kanwil Ditjenpas DIY mampu menghadirkan solusi bagi persoalan kemanusiaan.

"Pelayanan terbaik tidak hanya diberikan di dalam lingkungan Pemasyarakatan, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian kepada sesama. Semoga bantuan air bersih ini dapat meringankan kebutuhan warga dan menjadi manfaat bagi sesama," ujar Ali Syeh.

Antusiasme masyarakat terlihat saat distribusi air dilakukan di setiap titik penyaluran. Warga bergotong royong menyiapkan tempat penampungan, sementara jajaran Kanwil Ditjenpas DIY memastikan proses distribusi berjalan tertib dan merata.



Melalui kegiatan bakti sosial ini, Kanwil Ditjenpas DIY menegaskan komitmennya untuk terus mendukung implementasi 15 Program Aksi Kemenimipas melalui kolaborasi dan aksi nyata. Semangat berbagi dan kepedulian diharapkan menjadi bagian dari pengabdian Pemasyarakatan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

WUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI, KANWIL DITJENPAS DIY GELAR BIMTEK KEARSIPAN



YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) terus memperkuat tata kelola administrasi melalui pengelolaan arsip yang tertib, efektif, dan sesuai ketentuan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pengawasan Kearsipan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemusnahan Arsip yang digelar di Kanwil Ditjenpas DIY, Selasa (8/9).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kompetensi jajaran dalam mengelola arsip, khususnya terkait prosedur pemusnahan arsip yang telah memenuhi ketentuan retensi. Pengelolaan arsip yang baik dinilai penting dalam mendukung tertib administrasi sekaligus memastikan setiap dokumen kedinasan dapat dikelola, disimpan, ditemukan kembali, maupun dimusnahkan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan diikuti oleh pejabat, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) di lingkungan Kanwil Ditjenpas DIY, serta perwakilan arsiparis dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-DIY. Para peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan serius dan antusias.

Dalam arahannya, Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, menekankan pentingnya mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, bimtek menjadi momentum bagi jajaran untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Ikuti kegiatan ini dengan baik. Kita mendapatkan ilmu dari kegiatan ini, dan ilmu yang kita dapatkan harus bisa memberikan kontribusi bagi negara,” pesan Ali.

Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjenpas DIY ini dilanjutkan dengan penyampaian materi pemusnahan arsip oleh Arsiparis Madya dan Arsiparis Muda untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai tahapan serta mekanismenya. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan di lingkungan kerja Kanwil maupun UPT Pemasyarakatan agar pengelolaan arsip semakin tertib, terukur, dan sesuai ketentuan.

Melalui upaya ini, Kanwil Ditjenpas DIY berkomitmen membangun budaya kerja yang tertib administrasi demi mendukung efektivitas tugas serta memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.



DARI RUTAN UNTUK KEMANDIRIAN, KAKANWIL DITJENPAS DIY BEKALI WBP KETERAMPILAN PIJAT ENERGI





YOGYAKARTA – Masa menjalani pidana bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk terus belajar dan mempersiapkan diri menyongsong kehidupan yang lebih baik. Semangat tersebut ditunjukkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY), Muhammad Ali Syeh Banna, melalui kegiatan berbagi keterampilan bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas IIA Yogyakarta, Selasa (8/9).

Dalam kesempatan tersebut, Ali Syeh tidak hanya memberikan bantuan sosial kepada WBP, tetapi juga membagikan keterampilan praktis berupa Terapi Pijat Energi. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk implementasi 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam mendorong pembinaan yang memberikan bekal positif dan bermanfaat bagi WBP.

Sebelum memasuki sesi pelatihan, Ali Syeh terlebih dahulu memberikan penguatan mental dan motivasi kepada para WBP serta petugas Rutan Jogja. Ia mengajak seluruh peserta untuk memaknai kehidupan melalui kajian ayat-ayat suci Al-Qur'an, salah satunya Surat Al-Ashr.

Melalui surat tersebut, Ali Syeh mengingatkan bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan harus diisi dengan hal-hal yang memberikan manfaat. Keterbatasan kondisi tidak seharusnya menjadi alasan untuk berhenti berusaha memperbaiki diri.

"Kita harus berusaha menjadi orang yang beruntung. Walaupun dalam kondisi terbatas, tetap harus ada ikhtiar, ilmu, dan kebaikan yang kita lakukan," pesan Ali kepada para WBP.

Setelah memberikan motivasi, Ali Syeh memimpin pelatihan Terapi Pijat Energi secara bertahap dan praktis, yang diikuti dengan antusias oleh WBP dan petugas. Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas DIY menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembinaan berorientasi perubahan, dengan memberikan bekal keterampilan dan penguatan mental agar warga binaan optimis menata masa depan serta berkontribusi positif di masyarakat.



BIDANG PK KANWIL DITJENPAS DIY BAHAS DIM UNTUK PERKUAT TATA KELOLA PELAYANAN PEMASYARAKATAN

YOGYAKARTA – Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar rapat internal pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Selasa (8/9). Bertempat di Ruang Rapat Semar Pandita, kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang akan dilaksanakan pada 21 September 2026.

Rapat yang diikuti pegawai Bidang PK tersebut membahas berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang perlu diinventarisasi dan ditindaklanjuti. Setiap tim PK dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) didorong untuk menyiapkan DIM berdasarkan peta layanan pemasyarakatan sebagai bahan evaluasi sekaligus upaya perbaikan tata kelola pelayanan publik di bidang pemasyarakatan.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah usulan penyederhanaan format laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) agar lebih sesuai dengan bentuk, kebutuhan, dan kondisi pelaksanaan tugas di lapangan.

Selain itu, dibahas pula solusi pemenuhan sanksi pasca-anak keluar dari LPKA ketika masih memiliki amar putusan hakim berupa pelatihan kerja di dalam LPKA. Langkah yang diusulkan antara lain melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi serta memperkuat peran PK dalam pendampingan proses putusan pengadilan, khususnya dalam menyampaikan saran dan rekomendasi.

Melalui penyusunan DIM ini, Kanwil Ditjenpas DIY diharapkan mampu merangkum berbagai permasalahan yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara lebih komprehensif. Hasil inventarisasi selanjutnya akan menjadi bahan dalam Rakernis untuk menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti, sehingga mampu mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah DIY.

KANWIL DITJENPAS DIY IKUTI FGD BAHAS FORIS DAN KELAYAN BINTER



Yogyakarta — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD) secara daring yang membahas pembentukan Forum Reintegrasi Sosial (FORIS) dan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (8/9) pukul 09.00–10.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Semar Pandita.

FGD diselenggarakan oleh Ditjenpas dengan melibatkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kantor Wilayah Ditjenpas DIY beserta jajaran, seluruh Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) se-DIY beserta jajaran, serta sejumlah stakeholder terkait.

Pembahasan dalam FGD difokuskan pada tindak lanjut pelaksanaan program Kelayan Binter sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan bimbingan integrasi dan mendukung proses reintegrasi sosial.

Melalui forum tersebut, setiap pihak didorong untuk menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya dengan membangun komunikasi yang terarah dan terpusat.

Koordinasi tersebut mencakup pembahasan berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program di lapangan, sekaligus pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung keberlangsungan program.

Sebagai tindak lanjut, pengukuhan Kelayan Binter direncanakan berlangsung sekitar 16 atau 17 September 2026. Pengukuhan tersebut menjadi salah satu tahapan untuk menentukan kelompok integrasi dengan melibatkan stakeholder terkait. Kehadiran dan dukungan seluruh pihak diharapkan dapat meminimalkan potensi kendala dalam pelaksanaan program.

Selain itu, Kepala Balai Pemasyarakatan dari seluruh Indonesia akan diundang secara berkala setiap bulan untuk mengikuti rapat koordinasi. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan informasi perkembangan program, memberikan dukungan, serta menyampaikan pendapat dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di masing-masing wilayah.

Hasil FGD akan ditindaklanjuti oleh Balai Pemasyarakatan melalui pelaporan kepada Kantor Wilayah Ditjenpas setempat. Penguatan koordinasi dengan stakeholder diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program Kelayan Binter secara optimal dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

KANWIL DITJENPAS DIY BAHAS KEMBALI UU PEMASYARAKATAN, AJAK SELURUH SEDULUR GALA WICARA KEMBALI MENGINGAT ATURAN DASAR



YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengajak seluruh insan pemasyarakatan untuk menguatkan pemahaman terhadap aturan dasar penyelenggaraan pemasyarakatan. Hal tersebut dibahas dalam kegiatan Gala Wicara Pemasyarakatan Jogja yang menjadi ruang berbagi wawasan sekaligus mengingat kembali substansi Undang-Undang Pemasyarakatan.

Kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh Sedulur Gala Wicara untuk kembali membuka dan memahami ketentuan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Pemahaman terhadap regulasi dinilai penting agar setiap pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor hukum serta sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

Melalui forum yang dikemas secara komunikatif dan interaktif, peserta diajak tidak sekadar mengingat pasal demi pasal, tetapi juga memahami semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesamaan pemahaman, terutama dalam menghadapi dinamika pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang terus berkembang.

Kanwil Ditjenpas DIY menegaskan bahwa pemahaman terhadap aturan dasar merupakan bagian penting dalam membangun profesionalisme dan integritas insan pemasyarakatan. Dengan kembali mengingat fondasi hukum yang menjadi pedoman bersama, diharapkan seluruh jajaran semakin yakin dan konsisten dalam memberikan pelayanan, melaksanakan pembinaan, serta menjalankan tugas pemasyarakatan secara profesional dan bertanggung jawab.

KANWIL DITJENPAS DIY DAMPINGI TIM TEKFORMA LAKUKAN MONITORING SARPRAS TI







Yogyakarta — Kanwil Ditjenpas DIY mendampingi Tim Tekforma Ditjen Pemasyarakatan dalam kegiatan monitoring, evaluasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana layanan pemasyarakatan dalam kegiatan monitoring, evaluasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana layanan Pemasyarakatan berbasis teknologi informasi melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Kegiatan dilaksanakan pada Selasa (8/9) pukul 15.00 hingga 20.30 WIB di Lapas Jogja dan Rutan Jogja.

Kegiatan tersebut melibatkan Tim Tekforma Ditjenpas bersama JFT Kanwil Ditjenpas DIY. Pendampingan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan dan optimalisasi infrastruktur teknologi informasi yang mendukung keberlangsungan layanan Pemasyarakatan berbasis SDP.

Dalam kegiatan ini, tim melaksanakan pemeliharaan dan pengecekan server untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas infrastruktur TI. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan layanan *self service* bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), meliputi kondisi sarana, pemanfaatan oleh pengguna layanan, serta berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya.

Tim juga melakukan diskusi dan koordinasi mengenai langkah-langkah preventif dalam menjaga sarana dan prasarana teknologi informasi.

Upaya tersebut mencakup pemantauan kondisi perangkat, perawatan secara berkala, serta langkah antisipasi terhadap potensi gangguan yang dapat menghambat keberlangsungan layanan Pemasyarakatan.

Melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan pemeliharaan ini, diharapkan kesiapan sarana dan prasarana TI dapat terus ditingkatkan, potensi gangguan layanan dapat dicegah, serta pemanfaatan SDP berjalan secara optimal dalam mendukung pelayanan Pemasyarakatan yang efektif dan berkelanjutan.

KAKANWIL DITJENPAS DIY DORONG PENGUATAN KOMPETENSI SDM UNTUK TINGKATKAN KINERJA PEMASYARAKATAN



YOGYAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY), Muhammad Ali Syeh Banna, mendorong jajaran untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu kunci dalam mewujudkan kinerja pemasyarakatan yang semakin profesional dan berkualitas.

Arahan tersebut disampaikan Ali Syeh dalam Rapat Kerja Kanwil Ditjenpas DIY yang digelar pada Rabu (9/9). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa peningkatan kompetensi harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh jajaran, seiring dengan tuntutan tugas dan perkembangan penyelenggaraan pemasyarakatan yang semakin dinamis.

Menurutnya, kualitas SDM memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Oleh karena itu, setiap pegawai perlu memiliki kemauan untuk terus belajar, mengembangkan kemampuan, serta menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebutuhan organisasi.

"Kompetensi SDM tentu akan berpengaruh terhadap capaian tugas dan fungsi kita. Saat ini kita telah difasilitasi oleh pusat. Dengan Aplikasi PK Bangkom, Kanwil dapat merencanakan berbagai pelatihan yang dibutuhkan, dan nantinya akan difasilitasi oleh pusat dengan sertifikat sebagai bukti autentik," tutur Ali Syeh.

Pemanfaatan Aplikasi PK Bangkom menjadi peluang bagi Kanwil Ditjenpas DIY untuk merencanakan pengembangan kompetensi pegawai secara terarah dan sesuai kebutuhan organisasi. Guna merealisasikannya, dilakukan penjaringan aspirasi serta inventarisasi kebutuhan keterampilan teknis maupun pendukung dari setiap bidang yang nantinya diusulkan ke tingkat pusat secara sistematis dan terukur. Ali Syeh menekankan pentingnya pemetaan ini agar pelatihan tepat sasaran, memberikan manfaat nyata dalam tugas sehari-hari, serta tidak sekadar berfokus pada perolehan sertifikat. Langkah berkelanjutan ini merupakan komitmen untuk membentuk SDM pemasyarakatan yang adaptif, profesional, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan.



KANWIL DITJENPAS DIY BAHAS PENILAIAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK



YOGYAKARTA – Kanwil Ditjenpas D.I. Yogyakarta mengikuti zoom yang membahas Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Opini Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman serta kesiapan satuan kerja dalam memenuhi standar pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian tahun 2026 merupakan bagian dari transformasi penilaian Ombudsman RI yang sebelumnya berfokus pada kepatuhan menuju penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian mencakup berbagai aspek pelayanan administratif, jasa, dan barang, dengan lokus instansi vertikal seperti Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Balai Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat empat dimensi utama yang menjadi alat ukur penilaian, yaitu dimensi input, proses, output, dan pengaduan. Dimensi tersebut mencakup kesiapan sumber daya manusia dan sistem pendukung, pemenuhan standar pelayanan, kualitas layanan berdasarkan evaluasi eksternal, serta pengelolaan pengaduan dan respons terhadap masukan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, setiap satuan kerja di lingkungan Kanwil Ditjenpas DIY didorong melakukan pemeriksaan mandiri terhadap dokumen dan sarana publikasi standar layanan, mengoptimalkan sistem pengaduan, serta menyelaraskan SOP dengan regulasi terbaru Ombudsman RI. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan sesuai dengan ketentuan.



KANWIL DITJENPAS DIY BERSAMA DPRD DIY DORONG PENGUATAN TATA KELOLA KESEHATAN JIWA LINTAS INSTANSI

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) DPRD DIY dalam Rapat Pembahasan Rekomendasi Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa. Pertemuan strategis lintas sektor ini berlangsung di Gedung DPRD DIY, Rabu (9/9).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Pansus DPRD DIY tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan langkah konkret penanganan kesehatan jiwa di wilayah DIY. Kehadiran perwakilan Kanwil Ditjenpas DIY menegaskan komitmen jajaran pemasyarakatan dalam mendukung sinergi kebijakan daerah, khususnya terkait pemenuhan hak dan pelayanan kesehatan mental bagi warga binaan dan petugas.



Keterlibatan Kanwil Ditjenpas DIY dalam agenda ini memiliki peran vital guna menyelaraskan standar pelayanan kesehatan jiwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan sistem rujukan serta layanan primer yang dikelola pemerintah daerah. Hal ini krusial untuk memastikan warga binaan yang membutuhkan penanganan kesehatan mental mendapatkan akses medis yang layak, terpadu, dan berkelanjutan.

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas DIY, Ina Purnaningati Saputro, menyampaikan bahwa kesepakatan atas rekomendasi Pansus Perda Kesehatan Jiwa ini akan menjadi rujukan penting bagi instansi. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Kanwil Ditjenpas DIY siap memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan serta instansi terkait demi menghadirkan layanan pemasyarakatan yang holistik, inklusif, dan humanis di Daerah Istimewa Yogyakarta.



KANWIL DITJENPAS DIY PERKUAT LAYANAN SDP BERSAMA DIR TI & KERJA SAMA PEMASYARAKATAN





YOGYAKARTA – Transformasi digital Pemasyarakatan terus diperkuat melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Layanan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (9/9).

Kegiatan diawali dengan penyambutan Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, Kadiyono, oleh Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna. Selanjutnya, Tim Tekforma Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan pendampingan kepada jajaran Kanwil dan operator UPT Pemasyarakatan se-DIY sebagai bagian dari penguatan implementasi layanan berbasis teknologi informasi.

Dalam arahannya, Kadiyono menegaskan bahwa Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) merupakan fondasi utama pengelolaan data dan proses bisnis Pemasyarakatan yang terintegrasi. Ia mengingatkan bahwa kualitas layanan digital sangat bergantung pada ketepatan, kelengkapan, dan pembaruan data oleh seluruh petugas.

"SDP harus menjadi sistem yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas data merupakan tanggung jawab seluruh jajaran, bukan hanya tim teknologi informasi," tegas Kadiyono.

Sementara itu, Muhammad Ali Syeh Banna menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan Tim Tekforma Ditjenpas. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan pemahaman sekaligus memastikan sarana dan prasarana layanan berbasis TI berjalan optimal.

"Penguatan teknologi informasi harus diiringi dengan peningkatan kompetensi SDM dan kedisiplinan dalam mengelola data. Dengan demikian, pelayanan Pemasyarakatan akan semakin efektif, transparan, dan profesional," ujar Ali Syeh.

Melalui monitoring, evaluasi, dan pendampingan yang berkelanjutan, Kanwil Ditjenpas DIY berkomitmen memperkuat kualitas data serta mengoptimalkan sarana prasarana teknologi informasi. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi erat antara Ditjenpas, Kanwil, dan seluruh UPT di Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendukung terwujudnya transformasi digital Pemasyarakatan secara optimal.

DIREKTUR TI & KERJA SAMA DITJENPAS TINJAU IMPLEMENTASI SDP DI UPT WILAYAH DIY

SLEMAN – Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Kadiyono, melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sleman, Rabu (9/9). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau secara langsung implementasi teknologi informasi (TI) dan kerja sama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dalam kunjungan tersebut, Kadiyono didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) DIY, Muhammad Ali Syeh Banna. Keduanya meninjau sejumlah aspek penerapan teknologi informasi, dengan perhatian khusus pada implementasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sebagai salah satu sistem utama dalam mendukung pengelolaan data dan informasi Pemasyarakatan.

Kadiyono menyampaikan bahwa kunjungan langsung ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan bagian dari upaya Ditjenpas memastikan sistem



“Ini merupakan wujud nyata pendampingan Ditjenpas kepada jajaran. Kita ingin memastikan sistem utama dalam Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan mampu mendukung pelaksanaan tugas secara efektif,” ujar Kadiyono.

Melalui kunjungan dan monitoring secara langsung tersebut, Ditjenpas juga memperoleh gambaran mengenai berbagai kebutuhan serta kendala yang dihadapi jajaran dalam mengimplementasikan sistem. Data dan masukan yang diperoleh dari lapangan selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dalam proses penyempurnaan SDP yang saat ini terus dikembangkan.

Kakanwil Ditjenpas DIY Muhammad Ali Syeh Banna menyambut baik pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut. Menurutnya, penguatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola Pemasyarakatan yang semakin efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari komitmen Ditjenpas untuk terus memperkuat transformasi digital Pemasyarakatan melalui sistem informasi yang terintegrasi, sekaligus memastikan implementasinya dapat memberikan dukungan nyata bagi jajaran dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas Pemasyarakatan.

DIREKTUR TI DAN KERJA SAMA DITJENPAS APRESIASI KOLABORASI LAPAS SLEMAN DENGAN UGM





Sleman — Komitmen jajaran Pemasyarakatan dalam menghadirkan pembinaan yang produktif dan berkelanjutan kembali mendapat apresiasi pada Rabu (9/9). Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan mengapresiasi kolaborasi Lapas Kelas IIB Sleman dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam pengembangan batik wastra karya warga binaan.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat program pembinaan kemandirian melalui pengembangan potensi dan keterampilan warga binaan. Batik wastra dipilih tidak hanya sebagai produk kreatif, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya Nusantara.

Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyaraatan menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Lapas Sleman dalam membangun sinergi dengan perguruan tinggi. Menurutnya, keterlibatan institusi pendidikan dalam pembinaan Pemasyarakatan dapat memberikan nilai tambah terhadap kualitas program serta hasil karya warga binaan.

“Sedikit masukan, mungkin dapat ditambahkan satu ciri khas yang dapat menjadi penanda bahwa produk ini adalah karya warga binaan dari Lapas Sleman, sehingga orang yang melihat dapat mengetahuinya” ungkapnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta turut memberikan dukungan terhadap pengembangan program pembinaan berbasis potensi lokal.

Sinergi antara Lapas Sleman dan UGM dinilai sejalan dengan semangat Pemasyarakatan dalam membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat menjadi modal ketika kembali ke masyarakat.

Kanwil Ditjenpas DIY akan terus mendorong satuan kerja Pemasyarakatan di wilayah Yogyakarta untuk menghadirkan inovasi pembinaan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberdayaan warga binaan.



DIREKTUR TI DAN KERJA SAMA PEMASYARAKATAN APRESIASI LAPAS SLEMAN

Sleman - Kakanwil Ditjenpas Yogyakarta bersama Direktur Informasi dan Kerja sama Pemasyarakatan melaksanakan peninjauan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sleman pada Rabu (9/9).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari kegiatan peninjauan langsung terhadap kondisi dan pelaksanaan layanan Pemasyarakatan di Lapas Sleman. Kehadiran jajaran pimpinan menjadi bentuk perhatian terhadap penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah DIY.

Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil Ditjenpas DIY bersama Direktur Informasi dan Kerja sama Pemasyarakatan meninjau sejumlah aspek di lingkungan Lapas Sleman diantaranya klinik kesehatan, dapur, kamar hunian, dan bimker. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pelaksanaan kegiatan dan layanan yang berjalan di satuan kerja Pemasyarakatan.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Kantor Wilayah Ditjenpas DIY dengan Direktur Informasi dan Kerja sama Pemasyarakatan, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Koordinasi dan pemantauan secara langsung diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan.

Melalui peninjauan tersebut, Kanwil Ditjenpas DIY terus mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan agar berjalan secara optimal, sekaligus memastikan layanan di Lapas Sleman dapat terus mendukung penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan.

DITJENPAS DIY DORONG OPTIMALISASI SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN MELALUI GALA WICARA





YOGYKARTA - Kanwil Ditjenpas DIY menggelar Gala Wicara Pemasyarakatan Jogja bersama Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, Kadiyono, Rabu (9/9). Kegiatan yang berlangsung di Kanwil Ditjenpas DIY tersebut membahas optimalisasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sebagai bagian dari transformasi digital di lingkungan Pemasyarakatan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Pendampingan Tim Tekforma Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertujuan memastikan optimalisasi layanan berbasis teknologi informasi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan data pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah DIY.

Dalam kegiatan tersebut, Kadiyono menegaskan bahwa SDP memiliki peran strategis sebagai landasan utama dalam transformasi digital Pemasyarakatan. Menurutnya, SDP tidak sekadar berfungsi sebagai media penyimpanan data, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai proses bisnis Pemasyarakatan secara terintegrasi.

"Di era sekarang kita harus menguasai teknologi karena hal tersebut menjadi peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kita termasuk dalam pengelolaan Pemasyarakatan kita," jelas Kadiyono.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi bagi jajaran Pemasyarakatan. Penguasaan teknologi dinilai menjadi kebutuhan dalam menghadapi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin mengedepankan digitalisasi, termasuk dalam pengelolaan data dan pelayanan Pemasyarakatan.

Melalui pendampingan Tim Tekforma, optimalisasi SDP di seluruh UPT Pemasyarakatan di DIY diharapkan dapat terus ditingkatkan. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya untuk memastikan data Pemasyarakatan dikelola secara baik dan dapat mendukung pengambilan keputusan serta penyelenggaraan layanan yang lebih berkualitas.

Gala Wicara Pemasyarakatan Jogja menjadi salah satu wadah untuk memperkuat pemahaman jajaran Pemasyarakatan terhadap pentingnya teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas. Selain membahas SDP, kegiatan ini juga mendorong terwujudnya pengelolaan Pemasyarakatan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik.

DARI ILMU JADI PENGHASILAN, KAKANWIL DITJENPAS DIY AJARKAN PIJAT ENERGI KE WBP



SLEMAN – Berbagi tidak selalu diwujudkan melalui materi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY), Muhammad Ali Syeh Banna, memilih berbagi ilmu dan keterampilan pijat energi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Kamis (10/9), sebagai bekal menuju kehidupan yang lebih mandiri.

Kegiatan tersebut merupakan implementasi 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berfokus pada pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan keterampilan. Puluhan WBP mengikuti pelatihan dengan antusias, mulai dari pengenalan teknik dasar hingga praktik pijat energi secara langsung.

Dalam arahannya, Muhammad Ali Syeh Banna menegaskan bahwa ilmu merupakan bentuk bantuan yang memiliki manfaat jangka panjang karena dapat terus dikembangkan menjadi kemampuan yang produktif.

“Bantuan tidak selalu berupa barang. Ketika kita membagikan ilmu dan keterampilan, manfaatnya akan terus hidup. Harapannya, kemampuan ini menjadi bekal untuk membantu diri sendiri, keluarga, bahkan menjadi peluang usaha setelah kembali ke masyarakat,” ujar Ali Syeh.

Selama pelatihan, para peserta mempraktikkan teknik pijat secara berpasangan sehingga tidak hanya memahami teori, tetapi juga membangun kepercayaan diri dalam menguasai keterampilan baru. Suasana interaktif tersebut menjadi bagian dari pendekatan pembinaan yang mendorong warga binaan terus menggali potensi diri.



Menurut Ali Syeh, Pemasyarakatan bertujuan mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali menjadi pribadi yang produktif dan bermanfaat. Melalui pelatihan pijat energi, Kanwil Ditjenpas DIY memperkuat pembinaan yang humanis dan berorientasi pada kemandirian dengan membekali warga binaan keterampilan yang memiliki nilai sosial dan ekonomi sebagai bekal untuk kehidupan setelah bebas.



KAKANWIL DITJENPAS DIY AJAK WBP LAPAS NARKOTIKA JOGJA OPTIMIS JALANI HIDUP

SLEMAN - Masa menjalani pidana bukan menjadi alasan untuk kehilangan harapan. Pesan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjenpas Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Ali Syeh Banna, saat berbagi semangat dan motivasi bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Kamis (10/9).

Bertempat di Masjid At-Taubah Lapas Narkotika Yogyakarta, Ali Syeh mengajak para WBP untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an sekaligus memahami pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu yang menjadi bahan kajian adalah Surat Al-Ashr.

Ali Syeh menyampaikan bahwa keimanan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjalani kehidupan. Ia mengajak WBP untuk menjadikan masa pembinaan sebagai momentum melakukan introspeksi, memperbaiki diri, dan membangun harapan untuk masa depan.

"Bahwa iman itu benar-benar memberikan keberuntungan. Maka salah satu kunci agar kita bisa beruntung, memegang teguh iman, itu janji Allah melalui ayat Al-Ashr," tutur Ali Syeh.

Menurutnya, setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu, ia mengajak seluruh WBP untuk tidak larut dalam masa lalu, melainkan menatap masa depan dengan penuh optimisme.

Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Ditjenpas DIY terus mendorong penguatan pembinaan kepribadian sebagai bagian penting dalam proses Pemasyarakatan. Tidak hanya menjalani masa pidana, WBP diharapkan mampu menjadikan masa pembinaan sebagai momentum untuk menemukan kembali semangat, memperkuat karakter, dan menyiapkan diri untuk kembali menjadi bagian yang positif di tengah masyarakat.

KANWIL DITJENPAS DIY PERKUAT PEMENUHAN HAK TAHANAN RUTAN BANTUL MELALUI LAYANAN PENYULUHAN HUKUM



BANTUL – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) terus memperkuat pemenuhan hak-hak hukum bagi warga binaan di seluruh wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan serta konsultasi hukum gratis oleh Tim Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Kanwil Ditjenpas DIY bagi para tahanan di Aula Rutan Kelas IIB Bantul, Kamis (10/9).

Kegiatan diawali dengan doa bersama dan perkenalan tim penyuluh hukum guna membangun suasana interaktif dan kondusif. Kehadiran para penyuluh di tengah-tahanan Rutan Bantul bertujuan untuk memberikan wawasan hukum yang komprehensif, sehingga para tahanan dapat menjalani seluruh tahapan proses peradilan yang sedang dihadapi secara transparan dan berkeadilan.

Dalam sesi penyampaian materi, tim penyuluh memberikan pembekalan mengenai Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana Berdasarkan UU Pemasyarakatan serta sosialisasi Paradigma KUHP Baru/Nasional. Penjelasan ini menekankan pergeseran paradigma hukum pidana modern di Indonesia yang kini lebih menitikberatkan pada pendekatan keadilan restoratif, rehabilitatif, serta pelindungan hak asasi manusia.

Antusiasme peserta terlihat saat memasuki sesi sharing dan tanya jawab, di mana para tahanan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi mengenai dinamika perkara hukum mereka. Melalui dialog dua arah ini, para tahanan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, memahami hak dan kewajibannya, serta mematuhi seluruh tata tertib yang berlaku selama masa penahanan di Rutan Bantul.

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas DIY, Ina Purnaningati Saputro, menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-DIY. Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya memperluas literasi hukum warga binaan, tetapi juga mendukung terciptanya iklim pemasyarakatan yang kondusif, aman, dan berorientasi pada pemulihan.



KANWIL DITJENPAS DIY IKUTI BIMTEK BKN GUNA MANTAPKAN KESIAPAN PELAKSANAAN SKD CATAR POLTEKIMIPAS 2026





YOGYAKARTA – Panitia Seleksi Daerah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Taruna/Tarunisasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Catar Poltekimipas) Tahun 2026 secara virtual, Kamis (10/9). Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan seluruh tahapan rekrutmen berjalan akuntabel dan transparan.

Kegiatan dibuka resmi oleh Sekretaris BPSDM Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menyampaikan apresiasi atas sinergi bersama BKN dalam mempersiapkan ajang seleksi nasional ini. Dalam pemaparan awal oleh Narasumber Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen BKN, Dewi Sartika, tercatat sebanyak 10.931 peserta secara nasional dinyatakan lolos verifikasi administrasi untuk memperebutkan 375 formasi. Khusus wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 966 peserta dijadwalkan akan mengikuti tahapan SKD berbasis Computer Assisted Test (CAT) di Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

Dalam bimtek tersebut, BKN memaparkan rincian materi ujian yang mencakup Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Inteligensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) beserta ambang batas (passing grade) yang wajib dipenuhi peserta. Penerapan metode CAT BKN ini menjamin objektivitas penentuan kelulusan secara real-time, sehingga seluruh proses seleksi dapat dipantau langsung dan bebas dari potensi kecurangan.

Sesi teknis yang disampaikan oleh Narasumber BKN, Iqbal, mengupas secara detail alur kerja panitia instansi, mulai dari prosedur pembukaan segel ruang ujian, verifikasi identitas fisik dan face recognition, hingga sterilisasi barang bawaan peserta. Panitia Kanwil Ditjenpas DIY diinstruksikan untuk menerapkan pemeriksaan ketat terhadap keabsahan dokumen kependudukan peserta demi menjaga kelancaran dan integritas pelaksanaan seleksi.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas DIY, Kristiana Hambawani, menyampaikan bahwa jajarannya siap bersinergi secara maksimal dengan Tim Pelaksana CAT Kanreg I BKN Yogyakarta. Melalui pembekalan teknis ini, Kanwil Ditjenpas DIY berkomitmen menghadirkan sarana pelaksanaan tes yang tertib, aman, dan profesional demi menjaring kader-kader calon pemimpin pemasyarakatan dan imigrasi yang berkualitas tinggi.

KANWIL DITJENPAS DIY SIAPKAN LANGKAH STRATEGIS TINGKATKAN KUALITAS PETUGAS PEMASYARAKATAN LEWAT PEMBEKALAN TEKNIS



YOGYAKARTA – Kanwil Ditjenpas DIY terus berupaya meningkatkan kapasitas serta profesionalisme aparatur pemasyarakatan. Komitmen ini diwujudkan melalui Rapat Pembahasan Rencana Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Bidang Keamanan dan Pembinaan yang diselenggarakan di Aula Semar Wicaksana, Kamis (10/9).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Ina Purnaningati Saputro, tersebut menjadi wadah perancangan strategi pembekalan bagi petugas di lapangan. Pemetaan kebutuhan pelatihan ini penting dilakukan agar setiap program pengembangan kompetensi yang disusun dapat menjawab tantangan tugas teknis pemasyarakatan secara presisi.

Dalam pembahasan tersebut, disepakati bahwa kegiatan pengembangan kompetensi nantinya akan dikemas dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek). Pokok materi difokuskan pada penguatan pemahaman teknis di bidang keamanan, pengawasan, hingga metodologi pembinaan bagi warga binaan guna memastikan pelaksanaan tugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) berjalan sesuai standar operasional.

Selain merumuskan substansi materi, rapat juga membahas secara detail kesiapan teknis pelaksanaan, mulai dari penentuan jadwal, penetapan lokasi, pemetaan target peserta dari jajaran UPT, hingga pemenuhan kelengkapan administrasi kegiatan. Perencanaan yang matang ini diharapkan mampu menjamin efektivitas serta kelancaran penyelenggaraan bimtek mendatang.

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas DIY, Ina Purnaningati Saputro, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim pemasyarakatan yang aman dan kondusif. Melalui pembekalan yang terarah, Kanwil Ditjenpas DIY optimis para pegawai mampu menjalankan fungsi pengamanan dan pelayanan pembinaan secara makin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan.





KANTOR WILAYAH
DITJEN PEMASYARAKATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, selanjutnya mohon petunjuk dan arahan.

Yogyakarta, 11 September 2026
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY,

Muhammad Ali Syeh Banna



MUHAMMAD ALI SYEH BANNA
KAKANWIL DITJENPAS DIY